

**GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 121/PDT/2024/PT PLG)**

Oleh

Rozaan Ibnu Hayckal

E1B022036

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbuatan Andi Agus (Tergugat) dalam mengklaim tanah milik Nurhasan (Penggugat) untuk mendapatkan ganti rugi proyek pengadaan tanah pembangunan jalan tol, dari sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat I) dan Kepala Desa Tanjung Sejaru (Turut Tergugat III), sehingga mengakibatkan (Penggugat) terhalangi haknya atas ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi perbuatan melawan hukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III serta pertimbangan hakim dalam menentukan ganti kerugian yang diajukan Penggugat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif serta spesifikasi penelitian preskriptif analisis dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutus perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum namun, tidak mengkualifikasi kriteria perbuatan melawan hukum yang melanggar. Penulis berpendapat bahwa perkara ini memenuhi kriteria melanggar hak orang lain yaitu hak subyektif atas kekayaan berupa terhalanginya Penggugat untuk memperoleh ganti rugi atas tanah yang terkena proyek jalan tol dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya mengenai ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH. Perdata sudah terpenuhi namun, Majelis Hakim hanya mengabulkan ganti rugi mengenai kerugian materil berupa kompensasi senilai Rp207,846,758, dan menolak kerugian immateril dan materiil lainnya karena petitum Penggugat tidak didukung oleh bukti yang cukup.

Kata Kunci: Ganti Kerugian; Hak Milik Tanah; Perbuatan Melawan Hukum

**COMPENSATION FOR UNLAWFUL ACTS IN LAND
OWNERSHIP RIGHTS DISPUTES**

(Study of Palembang High Court Decision Number: 121/PDT/2024/PT PLG)

By

Rozaan Ibnu Hayckal

E1B022036

ABSTRACT

This research is motivated by the actions of Andi Agus (Defendant) in claiming land belonging to Nurhasan (Plaintiff) to obtain compensation for the land acquisition project for the construction of a toll road, from the certificate issued by the BPN Ogan Komering Ilir (Co-Defendant I) and the Head of Tanjung Sejar Village (Co-Defendant III), resulting in the (Plaintiff) being hindered in his right to compensation. This research aims to analyze the judge's considerations in qualifying the unlawful acts of the Defendant, Co-Defendant I, and Co-Defendant III and the judge's considerations in determining the compensation proposed by the Plaintiff. The approach method used is normative juridical and analytical prescriptive research specifications with secondary data collected through literature studies and analyzed normatively qualitatively. The results of this study indicate that the Panel of Judges decided the actions of the Defendant, Co-Defendant I, and Co-Defendant III as unlawful acts but did not qualify the criteria for unlawful acts violated. The author is of the opinion that this case meets the criteria for violating the rights of others, namely subjective rights to wealth in the form of the Plaintiff being prevented from obtaining compensation for land affected by the toll road project and is contrary to the perpetrator's legal obligations based on Article 26 Paragraph (1) and Article 32 Paragraph (1) of PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and Article 26 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Furthermore, regarding compensation based on Article 1365 of the Civil Code, it has been fulfilled, however, the Panel of Judges only granted compensation for material losses in the form of compensation worth Rp. 207,846,758, and rejected other immaterial and material losses because the Plaintiff's petitum was not supported by sufficient evidence.

Keywords: Compensation; Land Ownership Rights; Unlawful Acts